

SISTEM KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL PASCA BENCANA

Muhammad Badri

*Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293
Email: muhammad.badri@uin-suska.ac.id*

Abstrak

Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam dan non alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Menghadapi potensi bencana tersebut perlu ada upaya penanggulangan dengan melibatkan banyak pihak, mulai pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, dan masyarakat. Sistem komunikasi diperlukan agar kegiatan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien. Keterlibatan banyak pihak dalam penanganan bencana menunjukkan adanya sistem komunikasi yang berjalan baik secara alamiah maupun melalui intervensi kebijakan. Paradigma sistem komunikasi dalam penanganan bencana harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dibandingkan memberikan bantuan sesaat (charity). Sebagai sebuah sistem, antareleman (subsistem) harus saling terkait dan berkoordinasi dalam penanganan pasca bencana mulai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilakukan juga idealnya secara holistik di berbagai sektor secara berkelanjutan. Untuk itu model partisipatif merupakan strategi yang ideal dalam pembangunan sosial dengan tujuan jangka panjang untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti semula.

Kata kunci: *Sistem komunikasi, pembangunan, bencana*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Bencana) menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi di atas maka pembangunan pasca bencana penting dilakukan untuk memulihkan kehidupan masyarakat, mengingat besarnya korban dan kerugian yang terjadi akibat bencana. Terlebih Indonesia merupakan daerah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Untuk itu

perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan secara holistik dan melibatkan banyak pihak, mulai pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat sendiri. Berbagai kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan meliputi pencegahan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan disertai upaya penyelamatan, pertolongan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 26 (1) UU Bencana juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak: (a) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; (b) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (c) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; (d) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program

penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; (e) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan (f) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dalam konteks pembangunan sosial, penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sumber daya pembangunan dari ancaman bencana. Di samping itu, penanggulangan bencana juga merupakan upaya kegiatan ekonomi yang bertujuan memulihkan dan mengembalikan kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, serta memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat (Imamsari *et al.*, 2017).

Kejadian bencana umumnya juga mengundang empati dan simpati banyak pihak. Hal ini menurut Ahyudin (2005) sebagai sisi positif bencana, yaitu: (a) Mampu menggerakkan solidaritas masyarakat secara masif dan spontan dengan kesadarannya sendiri; (b) Mampu menggugah kesadaran sosial dan nilai-nilai dasar kemanusiaan secara universal; (c) Menjadi satu-satunya kejadian dimana masyarakat tanpa diminta, langsung menunjukkan partisipasi dan pengorbanannya; (d) Dapat membangkitkan semangat kreatifitas masyarakat, sehingga sangat mungkin akan menghantarkan pada kejayaan; dan (e) Dapat memupuk kebersamaan antar pihak, walau sesaat.

Setiap kejadian bencana banyak pihak ingin terlibat dalam penanganan pasca bencana. Mulai memberikan bantuan kepada korban pada masa tanggap darurat, penggalangan dana bantuan untuk korban, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pihak-pihak yang terlibat pun beragam, tidak hanya pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga dari perusahaan swasta melalui kegiatan *corporate social*

responsibility (CSR) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. bahu membahu dalam penanganan bencana.

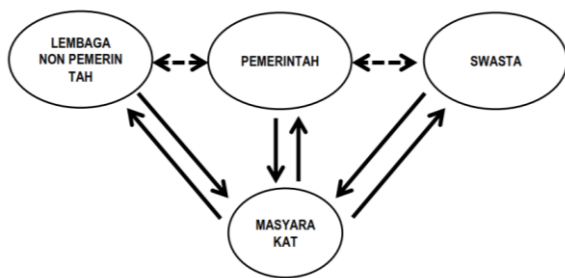
Salah satu contoh pasca bencana Gunung Merapi tahun 2010, untuk mengatasi program rehabilitasi pasca bencana, berbagai bantuan telah digelontorkan di antaranya berasal dari BNPB dan sinergitas dari seluruh Kementerian. Bantuan dari masyarakat terhadap korban bencana juga tidak sedikit. Hampir sebagian besar media massa baik cetak maupun elektronik membuka rekening untuk mengumpulkan dana masyarakat (Andayani, 2011).

Dalam pembangunan sosial pasca bencana, salah satu yang perlu diperhatikan adalah aspek pemberdayaan masyarakat khususnya korban bencana. Pemberdayaan masyarakat yaitu proses mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dengan intervensi pihak luar yang minimal, baik dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi pilihan strategis, keputusan atau tindakan, memobilisasi sumber-sumber, maupun menggerakkan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Intervensi pihak luar yang berlebihan dan tidak proporsional hanya akan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat, karena tidak terjadi proses pembelajaran diri atau proses pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri (Sumardjo, 2010).

Keterlibatan banyak pihak dalam penanganan bencana menunjukkan adanya sistem komunikasi yang berjalan baik secara alamiah maupun melalui intervensi kebijakan. Sistem komunikasi dalam penanganan bencana melibatkan proses komunikasi atau koordinasi antara pemerintah (BNPB, Pemerintah Daerah, dan lain-lain), organisasi non pemerintah (LSM, lembaga donor, media massa, dan lain-lain), swasta (perusahaan), dan masyarakat. Sistem komunikasi tersebut diperlukan agar kegiatan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien.

Penulis mengidentifikasi elemen sistem komunikasi pembangunan sosial pasca bencana terdiri dari empat subsistem yaitu pemerintah,

organisasi non pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai koordinator dalam penanganan bencana. Hubungan pemerintah dengan organisasi non pemerintah dan swasta bersifat koordinatif. Teknis pelaksanaan pembangunan sosial, baik pemerintah, organisasi non pemerintah maupun swasta dapat melakukan kegiatan langsung kepada masyarakat. Model komunikasi antarsubsistem dua arah, konvergen dan partisipatif seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka sistem Komunikasi dalam Pembangunan Sosial Pasca Bencana

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan kerangka sistem komunikasi dalam pembangunan sosial pasca bencana; dan (2) Menjelaskan praktik dan paradigma sistem komunikasi dalam pembangunan sosial pasca bencana.

KERANGKA KONSEPTUAL

Teori Sistem

Salah satu definisi sederhana sistem menyebutkan bahwa sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan definisi yang lengkap mengenai suatu sistem tertentu menunjukkan unsur-unsur sistem, tujuan sistem, kegiatan yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan, dan apa yang diproses oleh sistem itu serta apa hasilnya beserta ukuran keberhasilan pemrosesan tersebut (Amirin 1992).

Ritzer dan Goodman (2011) menjelaskan bahwa teoritis sistem paling terkemuka dalam sosiologi adalah Niklas Luhmann. Luhmann mengembangkan suatu pendekatan sosiologis yang menggabungkan elemen dari fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan teori sistem umum dan memperkenalkan konsep dari biologi kognitif, sibernatika dan fenomenologi. Luhmann terkenal karena pemikirannya tentang *autopoietic*. Luhmann berargumentasi bahwa masyarakat adalah sistem *autopoietic*. Ia memenuhi empat karakteristik: masyarakat menghasilkan elemen-elemen dasarnya sendiri, membangun struktur dan batas-batasnya sendiri, self-referential, dan tertutup. Elemen dasar dari masyarakat adalah komunikasi, dan komunikasi dihasilkan masyarakat. Partisipasi dalam masyarakat mengacu kepada masyarakat melalui komunikasi. Individu relevan dengan masyarakat hanya sejauh dia berpartisipasi dalam komunikasi atau dapat diinterpretasikan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam komunikasi (Ritzer dan Goodman, 2011).

Menurut Pace dan Faules (2010) konsep sistem berfokus pada pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian, dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan atau keseluruhan. Konsep sistem sedemikian luas sehingga sulit didefinisikan. Setiap pembahasan mengenai sistem menyangkut interdependensi. Jelasnya interdependensi menunjukkan bahwa terdapat suatu kesalingbergantungan di antara komponen-komponen atau satuan-satuan suatu sistem. Suatu perubahan pada suatu komponen membawa perubahan pada setiap komponen lainnya. Pemahaman atas konsep interdependensi ini merupakan bagian yang integral dari pendefinisian sistem dan teori sistem

Berikut ini beberapa hal terkait dengan sistem yang dikemukakan Pace dan Faules (2010):

- a. *Nonsumativitas*. Menunjukkan bahwa suatu sistem tidak sekedar jumlah dari bagian-bagiannya. Ketika komponen-

- komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam suatu interdependensi, sistem itu memperoleh suatu identitas yang terpisah dari masing-masing komponen.
- b. *Unsur-unsur struktur, fungsi, dan evolusi.* Struktur merujuk pada hubungan antarkomponen suatu sistem. Hubungan atasan-bawahan, misalnya, dapat dibedakan berdasarkan status, suatu unsur struktur. Struktur mencerminkan keteraturan.
 - c. *Keterbukaan.* Organisasi adalah suatu sistem sosial. Batas-batasnya dapat ditembus, yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga memperoleh energi dan informasi.
 - d. *Hierarki.* Suatu sistem mungkin merupakan suatu suprasistem bagi sistem-sistem lain di dalamnya, juga merupakan suatu subsistem bagi suatu sistem yang lebih besar. Arus informasi yang melintasi batas-batas suatu sistem dapat mempengaruhi perilaku struktural-fungsional sistem tersebut.

Pembangunan Sosial

Menurut Midgley (2005) pembangunan sosial adalah sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Beberapa aspek yang digarisbawahi dalam definisi ini adalah:

1. Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek ini yang membuat pembangunan sosial berbeda ketika dibandingkan dengan pendekatan lain dalam mengangkat kesejahteraan orang banyak. Pembangunan sosial mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial, pembangunan sosial melakukannya dengan konteks proses pembangunan.
2. Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (interdisipliner) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi. Pembangunan sosial juga menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologi secara eksplisit. Dengan isu-isu ideologis, pembangunan sosial diharapkan dapat lebih baik menciptakan intervensi dalam menganalisa dan menghadapi masalah sosial dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.
3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan itu sendiri lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, pertama, kondisi sosial awal yang akan diubah dengan pembangunan sosial, kedua, proses perubahan itu sendiri, ketiga, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.
4. Proses perubahan yang progresif. Perubahan yang dilakukan berusaha untuk perbaikan bagi seluruh manusia. Ide-ide akan perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan sosial.
5. Proses pembangunan sosial bersifat intervensi. Peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.

6. Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda tetapi hal ini dapat diharmonisasikan meskipun masih ditemui kesulitan untuk merangkum semuanya dalam sebuah sintesa.
7. Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih bersifat inklusif atau universal. Pembangunan sosial fokus makronya menargetkan perhatian pada komunitas, daerah dan masyarakat. Pembangunan sosial lebih tertuju pada mereka yang terlantar karena pertumbuhan ekonomi atau tidak diikutsertakan dalam pembangunan. Pembangunan sosial fokusnya bersifat pembagian daerah (spasial) seperti dalam kota, masyarakat pedesaan, perkotaan, daerah-daerah atau negara.
8. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Istilah kesejahteraan sosial ini digunakan dengan arti yang sangat luas dengan berkonotasi pada sebuah kondisi kesejahteraan sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan-kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial.

Soetomo (2013) berpendapat bahwa kewenangan masyarakat untuk melakukan upaya penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Dari pengamatan melalui praktik kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah sosial ini. Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar sosial yang berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal sosial, yang seperti halnya modal fisik dan finansial dapat digunakan sebagai energi

penggerak tindakan bersama termasuk dalam penanganan masalah sosial.

Dari awal sebenarnya pekerjaan sosial sudah bercirikan memberdayakan orang. Pekerjaan sosial tidak menolong orang untuk menerima bantuan dan terus bersandar pada bantuan orang lain, tetapi membangkitkan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri. Beberapa unsur umum yang menandai proses pemberdayaan dalam pembangunan sosial menurut DuBois dan Miley *dalam* Fahrudin (2012) adalah sebagai berikut:

1. Memusatkan pada kekuatan-kekuatan. Walaupun pekerja sosial menyadari adanya masalah dan kekurangan-kekurangan yang ada pada klien, tetapi yang lebih ditekankan dan dikemukakan pada klien adalah adanya kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka untuk dikembangkan lebih lanjut. Menekankan kekuatan dan kemampuan yang ada pada klien lebih dapat mendorong mereka untuk melakukan perubahan atas situasinya ketimbang mengemukakan masalah atas kekurangan-kekurangannya.
2. Bekerja secara kolaboratif. Ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam pekerjaan sosial, yaitu partisipasi. Klien harus terlibat secara integral dalam proses perubahan, mulai dari merumuskan situasi mereka sampai penentuan tujuan, memilih rangkaian tindakan, dan mengevaluasi hasilnya. Klien dipandang sebagai kolega, atau bahkan sebagai ahli dan konsultan dalam proses perubahan atas situasinya.
3. Secara kritis memikirkan tentang pengaturan struktural. Pekerja sosial perlu memeriksa secara kritis pengaturan sosiopolitis yang mungkin membatasi akses pada sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Pemikiran kritis mempertanyakan pengaturan struktural yang ada, distribusi kekuatan dan kewenangan, dan akses pada sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

4. Menghubungkan kekuatan pribadi dan kekuatan politis. Kekuatan pribadi meliputi kemampuan individu untuk mengontrol kehidupannya dan mempengaruhi lingkungannya. Kemampuan politik adalah kemampuan untuk mengubah sistem, mendistribusikan kembali sumber-sumber, membuka struktur kesempatan, dan mengorganisasi kembali masyarakat. Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan sosial merupakan jalan untuk melaksanakan kekuatan politik untuk perubahan sosial yang konstruktif.

Dalam pembangunan sosial kita tidak bisa melepaskan aspek modal sosial, yaitu kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan pada kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang paling besar, negara, dan seluruh kelompok lain yang ada di antaranya (Fukuyama, 2007).

Modal sosial adalah hubungan yang sifatnya mutual, kepercayaan, kelembagaan, nilai dan norma sosial lainnya yang berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan formal dalam masyarakat misalnya yang terjadi melalui organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, koperasi, partai politik dan sebagainya, sedangkan hubungan sosial yang informal misalnya interaksi sosial antara masyarakat dalam satu lingkungan. Hal yang sangat menentukan dalam penguatan modal sosial adalah intensitas interaksi antara warga masyarakat atau dengan pihak terkait, yang dapat berperan menjadi ruang publik yang partisipatif dan efektif (Sumardjo, 2010).

Komunikasi Bencana

Komunikasi selama dan sesaat setelah terjadi bencana merupakan komponen penting dari respons dan pemulihan, karena menghubungkan orang yang terkena dampak, keluarga, dan masyarakat dengan responden

pertama, sistem pendukung, dan anggota keluarga lainnya. Sistem komunikasi dan informasi yang andal dan dapat diakses juga merupakan kunci ketahanan masyarakat (NIDM, 2014).

Manajemen komunikasi bencana adalah pengaturan penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat. Komunikasi atau koordinasi penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk memperoleh tujuan yaitu agar penanganan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal (Lestari, 2011).

Dalam kondisi bencana menurut Susanto (2011), kecepatan komunikasi untuk pengambilan keputusan dan sistem komunikasi yang terhubung antar lembaga peduli bencana, akan meminimalisir jatuhnya korban. Acuan penanggulangan bencana dapat berjalan lancar jika manajemen informasi bencana dikelola dengan interaktif.

Menurut Budi (2011) dalam penanggulangan bencana Pusat Komunikasi (*Communication Centre*) menjadi hal penting untuk dipahami dan dikembangkan. Bidang ini bisa berfungsi sebagai pelayanan informasi, namun yang lebih penting adalah pelayanan dan koordinasi komunikasi antar sektoral. Tugas selain pengumpul data-memverifikasi dan pengolah informasi bagi kebutuhan pengguna, juga melakukan diseminasi informasi secara periodik, dengan beberapa prinsip dasar cepat, akurat, menjaga agar tidak terjadi *overload*, melalui proses penyebaran menggunakan maksimalisasi teknologi dan yang paling penting adalah memastikan akses yang mudah bagi yang membutuhkan, terutama korban bencana.

Komunikasi bencana sejatinya menjadi bagian penting dari manajemen bencana. Dimana manajemen bencana merupakan sekumpulan kebijakan dan keputusan-

keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan bencana. Sebab pemulihan (*recovery*) kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid bila mencoba membangun manajemen bencana (*disaster management*), agar siklus normalisasi kehidupan termasuk rehabilitasi tercapai dengan rentang waktu yang lebih pendek.

IMPLIKASI DAN DISKUSI

Elemen Sistem Penanganan Pasca Bencana

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang dikemukakan dalam bagian pendahuluan, maka elemen-elemen sistem terkait dengan penanganan bencana dapat dijelaskan menjadi empat elemen, yaitu pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk lebih memahami mengenai definisi dan peran masing-masing elemen, pada bagian ini dijelaskan tentang

1. Pemerintah

Dalam Pasal 5-9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Bencana) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara garis besar tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; (b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; (d) Pemulihan kondisi dari dampak bencana; (e) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/ APBD (Pemda) yang memadai; (f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan (g) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sedangkan wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; (b) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; (c) Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; (d) Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; (e) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; (f) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan (g) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional/ provinsi, kabupaten/ kota (Pemda).

2. Organisasi Non Pemerintah (ONP)

Organisasi non pemerintah (ONP) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Berdasarkan sejumlah literatur, secara garis besar ciri-ciri organisasi non pemerintah dapat dilihat sebagai berikut: (a) Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara; (b) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba); (c) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi (Gani, 2014).

ONP merupakan organisasi gerakan sosial profesional yang memiliki ciri-ciri adanya unsur-unsur profesionalisme, sistem manajemen dan struktur organisasi yang formal serta kemampuan teknis tertentu untuk kepentingan gerakan. ONP mampu memanfaatkan tersedianya keluhan kolektif dan

terbukanya struktur kesempatan politik untuk membangun struktur mobilisasi dalam lingkup peran advokasi kebijakan, kampanye publik, pengembangan kapasitas dan konsultasi, pengelolaan pengetahuan dan implementor lapangan (Ardhian *et al.*, 2016).

McPhail (2009) mengklasifikasikan ONP ke dalam empat kategori berbeda: (1) ONP berorientasi amal: ONP ini sering melakukan upaya paternalistik *top-down* dengan sedikit partisipasi penerima manfaat. Termasuk ONP dengan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, seperti distribusi makanan, pakaian atau obat-obatan; penyediaan perumahan, transportasi, dan sekolah. ONP ini juga melakukan kegiatan bantuan terjadi saat bencana alam atau bencana buatan manusia; (2) ONP berorientasi pelayanan: ONP dengan kegiatan seperti penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana atau layanan pendidikan di mana program ini dirancang oleh ONP, dan orang-orang diharapkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan dalam menerima layanan; (3) ONP berorientasi partisipatif: Kegiatan ONP ini terlihat pada proyek-proyek swadaya dimana masyarakat terlibat di dalamnya. Terutama terloibat dalam pelaksanaan proyek dengan menyumbangkan dana, sumber daya, dan tenaga kerja sukarela; dan (4) ONP berorientasi memberdayakan: ONP ini bertujuan membantu masyarakat miskin dengan mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan untuk memperkuat kesadaran mereka tentang potensi kekuatan mereka sendiri untuk mengendalikan kehidupan mereka. Kadang-kadang, kelompok ini berkembang secara spontan di sekitar masalah atau isu. ONP dengan orientasi memberdayakan dianggap paling penting dalam mempromosikan pembangunan dan mengurangi kesenjangan digital di negara-negara perifer.

Selain ONP lokal/ nasional dalam kegiatan penanganan bencana juga sering terlihat adanya keterlibatan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP). Menurut

PBB Definisi OINP yaitu “*those private organizations which commonly gain financial support from international agencies and which devote themselves to the design, study and execution of program and projects in developing countries*” (Organisasi-organisasi swasta yang biasanya mendapatkan dukungan finansial dari lembaga-lembaga internasional yang mengabdikan diri untuk perancangan, studi dan pelaksanaan program dan proyek-proyek di negara berkembang).

Menurut Kementerian Luar Negeri (2011) eksistensi OINP sebagai sebuah fenomena global juga telah merambah ke Indonesia. Dalam proses pembangunan di Indonesia, wilayah geografis dan jumlah penduduk Indonesia yang besar telah memberikan peluang lebih kepada Lembaga/Badan Kerjasama Asing (nama generik untuk OINP) untuk turut memberikan bantuan. Berbagai peristiwa di Indonesia, termasuk musibah bencana alam dan tsunami mendorong masuknya OINP ke Indonesia. Keberadaan OINP dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan kapasitas masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak potensi alam, pertanian dan peternakan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan unggulan (*livelihood*) bagi masyarakat setempat. Kerjasama OINP dapat diarahkan untuk peningkatan kemampuan manajemen pertanian dan peternakan. Kerangka kerjasamanya dapat berupa kerjasama pemulihan *livelihood* pasca-bencana, penanganan daerah rawan pangan, atau promosi potensi daerah lainnya.

3. Swasta

Elemen swasta dalam sistem komunikasi pembangunan sosial pasca bencana yaitu perusahaan-perusahaan swasta yang mengalokasikan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) untuk penanganan bencana. Melalui program CSR perusahaan-perusahaan dianggap dapat memaksimalkan dampak positif

kehadirannya kepada pemangku kepentingan yang spesifik, yaitu masyarakat yang sedang mengalami bencana dan membutuhkan pertolongan dengan segera.

Apalagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penekanannya pada Pasal 74 yang menyebutkan bahwa: (a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi CSR menurut Wibisono (2007) merupakan tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Walaupun sadar akan pentingnya CSR, perusahaan mengimplementasikan CSR dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Implementasi yang dilakukan dapat menggunakan model *charity* atau pemberdayaan. Perusahaan yang menggunakan model *charity* hanya berpatok sekadar menghabiskan anggaran dan menafikkan kebutuhan masyarakat. Model *charity* mendapat kritikan karena model tersebut hanya menjadi candu bagi masyarakat dan membuat

masyarakat tergantung serta tidak berdaya (Rachman *et Al*, 2011).

Istilah tanggungjawab sosial perusahaan sering dikritik sebagai terlalu berwajah filantropis, yakni hanya melibatkan program-program sosial jangka pendek dan pemberian uang atau barang dari perusahaan bagi sekelompok warga masyarakat. Karenanya, belakangan ini muncul gagasan baru mengenai konsep *corporate social investment* yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan konsep CSR, program-program sosial yang dirancang dalam konsep investasi sosial perusahaan umumnya memiliki dampak yang lebih berdimensi luas dan jangka panjang (*sustainable*) (Suharto, 2005).

Selama ini, dunia usaha sudah banyak yang memiliki kesadaran tinggi dengan menganggarkan dana-dana CSR, di mana sebagian dana tersebut disalurkan saat terjadinya bencana alam. Begitu tersiar kabar terjadinya bencana, berbondong-bondong perusahaan mengupayakan penggalangan bantuan finansial maupun nonfinansial dan disalurkan dengan mekanisme yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan penyaluran bantuan lewat lembaga pemerintah. Namun, terkadang bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara atau sesaat setelah terjadinya bencana. Padahal perusahaan seyogianya mampu menjadi pemberi kail, bukan ikan. Ia membantu masyarakat menjaga kesinambungan hidupnya. Sebaliknya, perusahaan pun akan mendapat manfaat yang berkesinambungan dari program CSR-nya. Oleh sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kalangan usaha melakukan CSR yang diwujudkan dalam bentuk bantuan yang dapat dirasakan efeknya tidak hanya pada saat tanggap bencana (Annas, 2014).

4. Masyarakat

Dalam penanganan bencana masyarakat merupakan elemen paling penting. Karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam

penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk: relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dan keahlian, mobilisasi dana, dan akses fasilitas. Sehingga dalam menangani dampak bencana, baik pada tahapan *emergency* maupun tahapan rehabilitasi, sebaiknya menggerakkan elemen lokal sebagai sumberdaya utama sepanjang itu masih dimungkinkan. Untuk menggerakkan elemen lokal tidaklah sulit, karena pada hakekatnya semua program dilakukan adalah kebutuhan mereka. Artinya menjadikan elemen lokal termasuk korban sebagai subjek, bukan objek. Prinsip ini akan jauh lebih maksimal hasilnya karena elemen lokal dan korban akan merasa memiliki terhadap program yang kita jalankan (Ahyudin, 2005).

Pelibatan masyarakat juga sesuai dengan rumusan Kerangka Kerja Hyogo 2005 – 2015 yang menyebutkan bahwa baik komunitas dan pihak berwenang di tingkat lokal harus diberdayakan dalam mengelola dan meredam resiko bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumber daya dan pihak berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi pengurangan risiko-risiko bencana (Wuryantari, 2005).

Berdasarkan panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat, juga dijelaskan bahwa di daerah rawan bencana seharusnya dibentuk Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) untuk mengurangi risiko bencana. KMPB terdiri dari anggota masyarakat yang dibentuk atas hasil keputusan bersama, sebab masyarakat berhak melakukan segala usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Tugas utama KMPB adalah membuat perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya (IDEP, 2005).

Pasal 26 UU Bencana juga menyebutkan bahwa setiap berhak untuk: (a) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; (b) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (c) mendapatkan

informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; (e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan (f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Terkait dengan hubungan antarelemen dalam sistem komunikasi penanggulangan bencana, Australian Red Cross (2012) memberikan beberapa saran dan implikasi dalam strategi ketahanan bencana:

- a. **Masyarakat.** Dukungan satu sama lain pada warga yang terkena bencana sangat penting untuk memotivasi mereka dalam rangka mempercepat pembangunan kembali. Sehingga dalam menghadapi bencana masyarakat harus memelihara jaringan informal dan menekankan perlunya saling membantu. Selain itu, peran tokoh masyarakat setempat dalam mendorong upaya pemulihan dapat memberikan titik sinyal bagi individu lain dan dapat memberikan titik koneksi antara penduduk lokal, pemerintahan dan organisasi eksternal.
- b. **Non-pemerintah.** Seringkali pada saat terjadi bencana dan tanggap darurat, dukungan dan perawatan berasal dari organisasi sosial. Mengingat jauhnya hubungan antara anggota masyarakat dengan kelompok-kelompok tersebut sering menjadikan masyarakat sebagai penerima bantuan yang pasif. Menghadapi masalah ini, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan memfasilitasi pengembangan keterampilan di tingkat masyarakat di berbagai bidang seperti dukungan sosial, mengorganisir kelompok, mengadakan pertemuan, menulis aplikasi hibah dan lobi, dapat

mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai tujuan yang mereka inginkan.

- c. **Pemerintah.** Pada penekanan tingkat pemerintah harus ditarik dari upaya pembangunan kembali murni fisik terhadap mengakui peran sistem dukungan sosial dalam membina pemulihan. Adalah penting bahwa respon dan implementasi kebijakan pemerintah tidak meredam efek sinyal yang dihasilkan oleh masyarakat sipil dan komersial yang mendorong kohesi masyarakat dan kepuasan. Pemerintah memiliki peran penting untuk bermain dalam membimbing proses pemulihan, tetapi harus teliti sadar menyosialisasikan upaya masyarakat dan membayangi solusi lokal. Pemerintah tindakan yang paling penting dapat mengambil dalam membantu masyarakat untuk mengatasi krisis, adalah untuk mendukung dan menginformasikan positif pengambilan keputusan di tanah, sambil memastikan tanggapan federal yang tidak tegak penghalang untuk kepemimpinan lokal yang kompeten.

Praktik Komunikasi dalam Pembangunan Sosial Pasca Bencana

Manajemen komunikasi bencana merupakan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana, penyebaran pesan dan penerimaan pesan dari tahap prabencana, saat terjadi bencana dan pascabencana. Pengorganisasian dalam manajemen komunikasi bencana erat kaitannya dengan pembentukan tim yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam pengelolaan bencana yang terjadi. Pengorganisasian melibatkan berbagai pihak dengan pemilihan yang tepat (Lestari, 2012).

Penelitian Badri *et al.* (2008) tentang pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan

fakta bahwa komunikasi berperan penting dalam penanggulangan bencana, terutama untuk menyinergikan kebijakan pemerintah dan program lembaga non pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat korban bencana untuk mempercepat proses penanggulangan bencana dengan melibatkan sumber daya lokal terutama pemuka pendapat.

Selaras dengan IDEP (2005) dalam penanganan pasca bencana yang ditemukan Badri (2008), anggota KMPB yang disebut Kelompok Masyarakat (Pokmas) dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Orang-orang yang sehat secara fisik dan mental, serta mampu mengatasi tekanan akibat bencana dapat menjadi anggota Pokmas. Peran komunikasi pemuka pendapat dilakukan dengan menempatkannya sebagai ketua/ koordinator Pokmas. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana tersebut meliputi: (a) Tanggap darurat: Penyelamatan korban yang masih hidup, pembersihan reruntuhan bangunan, pembangunan dapur umum, dan penyediaan hunian sementara; (b) Rehabilitasi: pelayanan publik, pelayanan sosial dasar, prasarana dan sarana dasar, pemulihan fasilitas perekonomian, pembangunan kembali perumahan, dan rehabilitasi mental; dan (c) Rekonstruksi: perbaikan sistem ekonomi masyarakat, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan kelembagaan

Penelitian Lestari (2012) terhadap manajemen komunikasi bencana merapi 2010 pada saat tanggap darurat menghasilkan temuan bahwa berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh para sukarelawan, lembaga-lembaga donor baik lokal maupun internasional, LSM dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menangani gempa Bantul, maka untuk penanganan tanggap darurat letusan Merapi dibentuklah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Forum ini adalah wujud dari amanat dalam UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa dalam pelaksanaan

penanggulangan bencana harus melibatkan para pihak dalam satu wadah koordinasi, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Penelitian LaLone (2012) yang menganalisis proses mobilisasi modal sosial pasca bencana tornado yang melanda wilayah Pulaski County, Virginia, Amerika Serikat pada April 2011 menjelaskan bahwa jejaring dan modal sosial lokal merupakan bagian penting dari ketahanan masyarakat terhadap respons dan pemulihan bencana lingkungan. Penelitian ini memberikan pandangan pada level mikro bahwa modal sosial dapat digerakkan di tingkat lokal dan saluran informal di daerah pedesaan pasca bencana lingkungan.

LaLone (2012) memberikan gambaran proses penanganan bencana berbasis masyarakat dengan memobilisasi sumber daya lokal pada minggu pertama pasca tornado menghancurkan Pulaski County. Dua jam sebelum tornado menghantam, pemerintah daerah setempat segera mengumumkan tanggap darurat dengan cepat dan membuka pusat darurat lokal di sekolah dasar. Hari 1-2 pasca bencana, modal sosial dan sumber daya lokal mulai dimobilisasi secara informal dan cepat. Tetangga dan keluarga datang untuk membantu para korban. Pada hari 3-4 mobilitas modal sosial berkembang cepat dari organisasi publik dan amal. Hari 5-7 bantuan bencana bukan hanya datang dari individu, kelompok sosial, dan organisasi amal, tetapi juga dari negara tetangga dan pemerintah daerah. Kemudian pada minggu 2-4 upaya penggalangan bantuan terus dilakukan melalui swasta, sekolah dan situs jejaring sosial seperti Facebook. Satu bulan kemudian mobilitas sumbangan menjadi lebih luas dan sumbangan datang dari berbagai negara.

Paradigma Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Sosial Pasca Bencana

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat dikemukakan bahwa paradigma sistem komunikasi dalam penanganan bencana harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat dibandingkan hanya memberikan

bantuan yang bersifat *charity*. Sebagai sebuah sistem, antareleman atau subsistem harus saling terkait atau berkoordinasi dalam penanganan pasca bencana mulai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilakukan juga idealnya secara holistik di berbagai sektor secara berkelanjutan.

Guna memperoleh efektifitas dan optimalisasi sumberdaya diperlukan persyaratan tertentu antara lain; (1) Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan; (2) Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis; (3) Kerja sama dan kemitraan antara berbagai pihak; (4) Koordinasi yang harmonis. Keempat syarat tersebut dipadukan untuk menyusun; Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penanggulangan Bencana. Koordinasi memerlukan; (1) Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik; (2) Adanya tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi; (3) Sumber daya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan; (4) Jalannya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda (Lestari, 2012).

Menurut Ahyudin (2005) salah satu syarat sukses penanganan *emergency* bencana adalah kepemimpinan. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan adalah kebingungan, kehancuran, kerugian, dan malapetaka. Kepemimpinan yang dimaksud tentu selayaknya dari unsur pemilik otoritas (pemerintah). Keberhasilan semua elemen masyarakat dalam kancas bencana sangat tergantung keberadaan pemimpin. Kepemimpinan dalam penanganan *emergency* bencana haruslah mampu dengan cepat, tepat, dan berani mengambil keputusan, bersikap tegas, menjalankan sistem instruksi bukan diskusi.

Pada kasus rehabilitasi pasca erupsi Merapi *recovery* akan berjalan efektif jika tersedia pendanaan, pendampingan dan pengawasan yang memadai, optimalisasi sumber daya lokal, serta dukungan komitmen politik. Kegiatan *recovery* dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sleman, dengan penanggungjawab Bupati Sleman, dibantu oleh pemerintah provinsi DIY, pemerintah pusat/BNPB, serta didukung oleh lembaga donor baik dari dalam dan luar negeri, swasta maupun masyarakat perorangan. Keterlibatan masyarakat terutama untuk kegiatan pemulihan dini dilakukan dalam bentuk *cash for work* atau program padat karya, yang dilaksanakan secara gotong royong (Andayani, 2011).

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan pasca bencana di Merapi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, dengan demikian masyarakat akan bangkit kembali dalam menata kehidupannya. Dimana menurut Sumardjo (2010) masyarakat akan berpartisipasi dalam upaya bersama mewujudkan harapan bersama tersebut apabila terkondisi adanya prasyarat untuk terjadinya partisipasi berikut: (1) Adanya kesempatan, yaitu adanya kesadaran masyarakat tentang peluang untuk dapat berpartisipasi. Kesadaran bahwa harapan yang terbangun juga perlu dicapai, karena bila harapan tersebut tercapai masyarakat merasakan manfaat yang besar; (2) Adanya kemauan, yaitu keinginan atau sikap positif terhadap harapan (*ideals*) dan terwujudnya harapan itu, sehingga sikap ini akan mendorong tindakan masyarakat untuk mewujudkan harapan bersama tersebut; dan (3) Kemampuan, yaitu adanya kesadaran masyarakat bahwa dirinya merasa memiliki kemampuan untuk meraih kesempatan, serta dengan kemauan yang kuat untuk mewujudkan harapan tersebut. Kemampuan itu antara lain ditandai dengan kepemilikan keterampilan, tenaga, pikiran, dana dan materi untuk dapat berpartisipasi mewujudkan harapan masyarakat bersama.

Terkait pentingnya modal sosial dalam pembangunan sosial pasca bencana, penelitian LaLone (2012) bila diterapkan pada tingkat lokal dan regional memberikan tiga pelajaran menguntungkan untuk lebih meningkatkan respons bencana dan perencanaan pemulihan: (1) Adanya potensi untuk memobilisasi sumber

daya sosial modal di daerah pedesaan, dimana kecepatan, volume, proses kelompok sosial dan tindakan individu dapat dimobilisasi menyusul bencana tak terduga. Pada level mikro juga menunjukkan bahwa individu benar-benar menyentuh jaringan sosial mereka untuk menghasilkan bantuan bagi korban bencana; (2) Pentingnya pesan inklusi modal sosial yang belum sepenuhnya dihargai atau dijadikan perencanaan darurat yang diterapkan di wilayah pedesaan dan terintegrasi dengan baik ke dalam perencanaan kesiapsiagaan darurat dalam struktur formal; dan (3) Menunjukkan pentingnya melakukan penelitian terapan tentang potensi modal sosial bagi perencanaan darurat di wilayah mereka. Kemudian mengadopsi pendekatan perencanaan bencana berbasis masyarakat di mana kelompok-kelompok masyarakat dan narasumber kunci diidentifikasi dan dilibatkan dalam perencanaan prabencana berkolaborasi praktisi darurat. Hal ini untuk lebih mengantisipasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan masuknya potensi kontribusi modal sosial yang mungkin dimobilisasi dalam situasi darurat bencana sehingga sumber daya dapat digunakan secara maksimal.

SIMPULAN

Pembangunan sosial pasca bencana merupakan isu yang menarik untuk dikaji, sebab upaya menghadapi dan menanggulangi suatu bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan nasional yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Pembangunan pasca bencana penting dilakukan untuk memulihkan kehidupan masyarakat, mengingat besarnya korban dan kerugian yang terjadi akibat bencana. Terlebih Indonesia merupakan daerah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Untuk itu perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan secara holistik dalam suatu sistem yang melibatkan banyak elemen, mulai pemerintah, organisasi swasta, organisasi non pemerintah, maupun masyarakat sendiri.

Pembangunan pasca bencana idealnya adalah melibatkan proses komunikasi dan koordinasi antarelemen sistem. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh tujuan yaitu agar penanganan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembangunannya sendiri perlu mengedepankan aspek pemberdayaan dibanding sekadar bantuan sesaat. Untuk itu model partisipatif merupakan strategi yang ideal dalam pembangunan sosial dengan tujuan jangka panjang untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti semula.

REFERENSI

- Ahyudin. (2005). *Peran Masyarakat Dalam Penanganan Bencana*. Materi Focus Group Discussion Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) tgl 17 Maret 2005 di Hotel Bidakara Jakarta. Artikel tersedia di: <http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/>
- Amirin, T. M. (1992). *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Andayani, T. T. (2011). Dana Sumbangan Masyarakat untuk Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana Merapi. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 2 (1): 41-49.
- Ardhian, D., Adiwibowo, S. & Wahyuni, E. S. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4 (3): 210-216.
- Australian Red Cross. (2012). *Relationships Matter: The Application of Social Capital to Disaster Resilience*. Artikel tersedia di: http://www.redcross.org.au/files/12-011_RED_Roundtable_Report_v3-F-web.pdf
- Badri, M., Hubeis, M. & Maksum. (2008). Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 6 (1): 55-71.
- Budi HH, S. (2011). *Komunikasi Bencana: Aspek makro dan Mikro*. Dalam Budi HH, S (ed), *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta (ID): Buku Litera.
- Fukuyama, F. (2007). *Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta (ID): Qalam.
- Gani, P. K. (2014). *Humas pada Organisasi Non Profit*. Artikel tersedia di: <http://www.lspr.edu/pritakemalgani/humas-pada-organisasi-non-profit/>
- IDEP. (2005). *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Bali (ID): Yayasan IDEP.
- Imamsari, F. S., Triastuti, R., & Wijianto, W. (2017). Partisipasi Masyarakat pada Penanggulangan Banjir dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Educitizen*, 2 (1): 143-156.
- Kementerian Luar Negeri. (2011). *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia*. Tersedia di: <https://www.kemlu.go.id/Buku/Direktori%20Organisasi%20Internasional%20Non%20Pemerintah%20di%20Indonesia.pdf>
- LaLone, M. B. (2012). Neighbors helping neighbors: an examination of the social capital mobilization process for community resilience to environmental disasters. *Journal of Applied Social Science*, 6(2), 209-237.
- Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2012). Manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 pada saat tanggap darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10 (2): 173-197
- Lestari, P. (2011). Manajemen Komunikasi Bencana dan Peluang Riset Komunikasi Bencana di Indonesia. Dalam Budi HH, S (ed), *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta (ID): Buku Litera.
- McPhail, T. L. (ed). (2009). *Development Communication Reframing the Role of the Media*. West Sussex (GB): Blackwell Publishing.
- Annas, B. Q. (2014). *Siapkan Program CSR Pasca Bencana*. Artikel tersedia di:

- <http://www.neraca.co.id/article/37191/Siapkan-Program-CSR-Pasca-Bencana>
- NIDM [The National Institute of Disaster Management]. (2014). *Disaster Communication*. Artikel tersedia di: http://nidm.gov.in/easindia2014/err/pdf/t_hemes_issue/technology/disaster_comm.pdf
- Pace, R.W. & Faules, D. F. (2010). *Komunikasi Organisasi*. Bandung (ID): Rosda.
- Rachman, N.M, Afendi, A & Wicaksana, E. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Depok (ID): Penebar Swadaya.
- Ritzer, G & Goodman, D. J. (2011). *Teori Sosiologi Kontemporer*. Edisi Keenam. Jakarta (ID): Kencana.
- Soetomo. (2013). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Sumardjo. (2010). *Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Pendamping Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan*. Artikel tersedia di: <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/32309>
- Susanto, E. H. (2011). *Eksistensi Komunikasi dalam Menghadapi Bencana*. Dalam Budi HH, S (ed), *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta (ID): Buku Litera.
- Wibisono Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik (ID): Fascho Publishing.
- Wuryantari, T. (2005). *Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana*. Jakarta (ID): MPBI.